

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Prof.Subekti,S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, 2003.

DR.Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Prof.Bushar Muhammad, S.H, Asas-Asas Hukum Adat , PT.Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2013.

Prof. Dr.Suteki, S.H.,M.Hum.,Galang Taufani, S.H.,M.H., Metodologi Penelitian Hukum , PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Universitas Trisakti, 2008.

H.Ridwan Syahrani S.H, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT.Alumni, Bukit Pakar, Bandung, 2006

Suandra, I. Wayan, Masalah Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

H.L.A HART, Konsep Hukum, Nusa Media, 2017.

Mudakir Iskandar Syah, Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum, PT Jala Permata, Jakarta, 2007.

Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda,Liberty, yogyakarta, 2000

Prof.A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Cv.Mandar maju, 2008

John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Gravika, 1994

Rusmadi, Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju, Bandung, 2007

Rudi Indrajaya, S.H., S.IP., Sp.N., Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik, PT.Refika Aditama , 2020.

Alting Husein, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010.

DR.H.Zainal Asikin S.H., S.U., Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke dua, 2012.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2020

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Cetakan Kesebelas Edisi Revisi. Jakarta, Djambatan, 2007.

Sarjita. Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta, 2005.

Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.S., Pengantar Hukum Tata Ruang, PT.Prenada Media, 2017.

Prof. Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, PT.Alumni, 2006.

Saleh Adiwinata S.H, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang pokok Agraria, PT.Alumni, Bandung, 1976.

DN Sutanto, Asas-Asas Pengadaan Tanah, Yogyakarta, 2013.

Gambaran Umum Pertanahan Indonesia Pegangan Yang Diberikan Oleh Staf Badan Pertanahan Nasional Bandung Saat Penulis Magang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata).

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya.

Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang No 38 tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 620-256-2020.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah  
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka  
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Tanah  
Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011, Tetang  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010 – 2030.

Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia No 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus  
Pertanahan.

### **Sumber Lain**

Jurnal Asih RD, Sutaryono, Alifia N, ‘Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah,  
[jurnalbhumi.stpn.ac.id](http://jurnalbhumi.stpn.ac.id)

Jurnal Rahayu Subekti , SH Mhum, kebijakan Pemberian Ganti Rugi Dalam  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,  
[https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8754/7838#:~:text=Ganti  
%20rugi%20adalah%20pemberian%20ganti,berhak%20dalam%20proses  
%20Pengadaan%20Tanah.](https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8754/7838#:~:text=Ganti%20rugi%20adalah%20pemberian%20ganti,berhak%20dalam%20proses%20Pengadaan%20Tanah.)

Sumber Berita Media MetroKini.com, Tentang Pemberhentian Proyek Nasional Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terhitung Tanggal 5 Maret 2021 Yang Terkendela Pembebasan Lahan.

Sumber Berita Media Datiak.com, Tentang Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terkendala Pembebasan Lahan.

Sumber Berita Media Klick Positif.com, Tentang Kendala-Kendala Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.

Web Resmi Kementrian PUPR Didalam Lembaran Pembangunan Nasional Jalan Tol Padang-Pekanbaru.